

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat. Pemerintah ada untuk melayani rakyat, dengan kata lain pemerintah adalah "pelayan rakyat". Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.<sup>1</sup>

Kemampuan di bidang ekonomi akan menjadi gerbang awal menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan sentosa. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah mengalami peningkatan yang dibuktikan pada kuartal I 2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru menyentuh level 4,9 persen. Dan pada akhir tahun 2016 pertumbuhan ekonomi nasional sudah menyentuh 5,1 persen.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 mencapai kisaran 5,1 hingga 5,3 persen. Saat menggelar sidang kabinet Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di kantor Presiden pada tanggal 4 April 2017, Presiden Jokowi Widodomeminta pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen pada 2018 mendatang. Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2018 jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi tahun

---

<sup>1</sup>Agus Dwiyanto, dkk.2004.*Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governance*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 79

2017 yang hanya 5,1 persen. Untuk mencapai target itu tentu pemerintah membutuhkan kerja keras.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif. Para investor baik lokal maupun asing masih enggan menanam modal di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain proses perijinan yang berbelit-belit, kualitas infrastruktur kurang memadai, masih banyak daerah yang menghambat iklim investasi, stabilitas politik, kepastian hukum bagi investor dan praktik pungli yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah terhadap investor.

Semua hal tersebut merupakan tantangan birokrasi sebagai pelayanan rakyat mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan meningkatnya tingkat kehidupan rakyat yang semakin baik. Rakyat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rakyat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah.

Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara yang sloganis menuju carakerja yang realistik pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik, pelayanan yang lebih baik dan

---

<sup>2</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/03/15/17354501/jokowi.ingin.pertumbuhan.ekonomi.2018.capai.6.1.persen>. Kompas.com - 15/03/2017, 17:35 WIB

profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas instansi pemerintah adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan adalah pada bidang perizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Perizinan usaha dan investasi selama ini mengandung konotasi negatif yaitu terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal. Dengan adanya keluhan ini, maka diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administrasi bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya.

Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dimulai dalam rangka perbaikan iklim usaha dan investasi. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Instruksi Presiden tersebut sebagai kebijakan strategis yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan tindakan yang lebih kongkrit sebagai terobosan untuk percepatan investasi. Salah satu kegiatan atau tindakan yang sangat penting dalam Inpres dimaksud adalah menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan untuk aktivitas investasi pada umumnya dan aktivitas Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) pada khususnya.

Kemajuan investasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Investasi menjadi satu cara dan sarana yang

sangat efektif dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari suatu daerah tertentu, sehingga menciptakan iklim investasi menjadi satu cita-cita tersendiri dari suatu daerah. Apalagi hal ini didukung dengan adanya satu upaya untuk memulihkan keadaan perekonomian daerah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan beberapa waktu lalu.

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintahan daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di satu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Hal ini dikarenakan permasalahan

pokok yang sering dihadapi investor dalam memulai usaha adalah mengenai perizinan. Oleh karena itu, untuk mempermudah perizinan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Perekonomian Kabupaten Sragen dapat dikatakan sebagai daerah penyangga kota Surakarta dan Jawa Tengah. Produk-produk pertanian Kabupaten Sragen sebagian besar disuplai ke kota Surakarta. Sektor pertanian cukup dominan bagi perekonomian Kabupaten Sragen. Beberapa produk pertanian, yaitu padi, kacang tanah, dan mangga, berperan cukup signifikan bagi produksi komoditi tersebut ditingkat Jawa Tengah.

Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana daerah mempunyai hak untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Sragen saat ini berlomba-lomba untuk menggali potensi ekonomi di daerahnya agar berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah sektor investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN INVESTASI (Studi tentang Pelayanan Perijinan di Kabupaten Sragen)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perijinan dan investasi?
2. Bagaimanakah mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi di daerah?
3. Bagaimanakah konsep membangun sistem pelayanan perijinan dan investasi yang efektif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peraturan tentang perijinan dan investasi.
2. Untuk menjelaskan mekanisme perizinan satu pintu yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Untuk menjelaskan konsep membangun sistem pelayanan perizinan dan investasi yang efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan untuk menambah, memperluas cakrawala, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat melalui perizinan satu pintu sehingga investasi di Kabupaten Sragen akan semakin meningkat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis akan memberikan gambaran mengenai isi materi dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan pemahaman tentang pelayanan publik, pemahaman tentang perizinan, pemahaman tentang investasi dan pemahaman tentang reformasi birokrasi. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta definisi konseptual.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan perijinan dan investasi pada umumnya, tentang mekanisme perijinan dan investasi satu pintu yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan investasi, serta tentang konsep membangun sistem pelayanan perijinan dan invesatasi yang efektif.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab penutup ini akan berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan thesis ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan

#### **DAFTAR PUSTAKA**